

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Hasil pemeriksaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kendal mulai tahun 2012 sampai tahun 2015 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian oleh BPK. Pada tahun 2016 opini yang diberikan oleh BPK mengalami peningkatan menjadi Wajar Tanpa Pengecualian. Hal ini yang membuat peneliti tertarik mengambil judul “Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Audit Internal dan Transparasi Kebijakan Publik Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kendal”.

Peluang perubahan paradigma dalam pembangunan nasional era reformasi kini sangat terbuka lebar. Perubahan paradigma diantaranya terwujud dalam kebijakan otonomi daerah dimana di atur dalam Perundang-undangan yakni Undang-Undang mengenai Pemerintah Daerah No. 32 Tahun 2004. Berdasar Undang-Undang Pemda tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 24 Tahun 2005 yang direvisi menjadi PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebuah prinsip akuntansi yang ditetapkan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah maka diharapkan laporan keuangan yang disusun telah berpedoman pada SAP sehingga menghasilkan laporan keuangan yang relevan dan handal. (Sari,dkk , 2014).

Selain itu, maraknya globalisasi yang menuntut daya saing di setiap negara juga menuntut daya saing di setiap Pemerintah Daerah, dimana daya saing Pemerintah Daerah ini diharapkan akan mampu tercapai melalui peningkatan kemandirian pemerintahan (Juwita, 2013). Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Ihsanti, 2014).

Akuntabilitas dan keterbukaan tata kelola keuangan pada Negara bisa diwujudkan lewat penyampaian pelaporan pertanggung jawaban keuangan yang syarat prinsip ketepatan waktu serta disusun mengikuti standar pada akuntansi pemerintahan. Kualitas informasi pada pelaporan keuangan pemerintah itu berpengaruh pada kepatuhan standar akuntansi yang didukung oleh sistem akuntansi yang sangat handal (Yusrawati dan Andini, 2015).

Pemerintah lingkup daerah harus menyusun pelaporan pertanggung jawaban dengan menggunakan sebuah sistem akuntansi, dimana sistem tersebut telah diatur pemerintah pusat yang berbentuk undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengikat ke semua pemerintah daerah. Pada sistem pemerintahan daerah ada 2 sub sistem akuntansi, yakni Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, serta Satuan Kerja Perangkat Daerah. Laporan keuangan SKPD menjadi sumber dalam penyusunan pelaporan keuangan SKPKD, oleh karena itu SKPD harus melakukan penyusunan pelaporan keuangannya sebaik mungkin (Megawati,dkk, 2015).

Salah satu bentuk konkrit dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang diantaranya mewajibkan pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk menyusun laporan keuangan pada setiap akhir periode akuntansi. Laporan keuangan dalam sektor publik memegang peranan penting dalam rangka melaksanakan akuntabilitas sektor publik. Penyusunan laporan keuangan sebagai suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas berupa keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik (Riyanti,dkk, 2015).

Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan, (Sihombing, 2014:4). Untuk dapat menghasilkan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai, maka laporan keuangan harus disusun sesuai sistem informasi keuangan daerah dan pegawai pemerintah daerah memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi (Yusniyar,dkk , 2016).

Informasi dalam laporan keuangan harus berkualitas, informasi dalam laporan keuangan yang akan dipublikasikan tersebut harus disajikan secara wajar terbebas dari salah saji yang material sehingga tidak menyesatkan para penggunanya, laporan keuangan hanya akan bermanfaat jika laporan keuangan yang di

informasikan disajikan dengan tingkat kevalidan tinggi dan andal. Jika pelaporan keuangannya yang dipublikasikan tidak baik, artinya pelaporan keuangan itu dihasilkan pada sistem akuntansi yang tidak baik/buruk, sehingga di dalamnya terkandung kesalahan material pada penyajiannya, susunannya tidak sesuai dari standar pelaporan, dan tidak ada ketepatan waktu pada penyampainnya, maka itu semua dapat berdampak yang tidak baik bagi pengguna pelaporan dan pihak-pihak yang menyajikan pelaporan itu sendiri (Botutihe, 2013).

Akibat lain dari informasi yang salah dan menyesatkan tersebut adalah para pengguna laporan yang kritis dan rasional akan bereaksi misalnya dengan memberikan kritik atau bahkan menuntut pemerintah selaku penyaji laporan karena telah memberikan informasi yang salah dan menyesatkan sehingga pengguna laporan tersebut dirugikan secara material akibat terlalu percaya dengan laporan tersebut. Jika pemerintah mengabaikan reaksi dari pengguna laporan tersebut atau cenderung membela diri, maka pemerintah akan terus membuat laporan keuangan yang buruk kualitasnya. Untuk menghindari hal tersebut satu-satunya cara adalah pemerintah harus terbuka untuk menerima kritik dan masukan serta berusaha untuk terus memperbaiki kualitas laporan keuangan yang di publikasinya (Botutihe, 2013).

Opini yang diberikan oleh BPK dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Laporan keuangan yang paling baik adalah laporan keuangan yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk mencapai opini WTP, peran sumber daya manusia berkompeten sangat mempengaruhi

peningkatan pada kualitas pelaporan keuangan. Proses penyusunan pelaporan keuangan hendaknya dilakukan dengan efisien dan seefektif mungkin, ketepatan waktu, kecepatan, keakuratan data yang dihasilkan, sehingga diperlukan sebuah dukungan/suatu teknologi dan sistem akuntansi (Megawati,dkk, 2015).

Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah juga sangat penting dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah merupakan penerapan sistem mulai dari pengelompokan, penggolongan, pencatatan dan pemrosesan aktivitas keuangan pemerintah daerah ke dalam sebuah laporan keuangan sebagai suatu informasi yang nantinya dapat digunakan oleh pihak tertentu dalam pengambilan keputusan oleh masing-masing SKPD dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan adanya pemanfaatan sistem informasi akuntansi ini di dalam proses penyusunan laporan keuangan, diharapkan dapat memudahkan proses penyusunan laporan keuangan dan memberikan manfaat bagi pemerintah demi mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas (Sari,dkk, 2014).

Menurut Riyanti,dkk (2015) audit internal merupakan inti dari akuntansi dalam bisnis dan merupakan bagian penting dari struktur tata kelola perusahaan dalam sebuah organisasi dan tata kelola perusahaan meliputi kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh dewan direksi dan komite audit untuk memastikan kredibel proses pelaporan keuangan. Salah satu internal audit yang dilakukan adalah melakukan reviu atas laporan keuangan. Reviu yang dilakukan oleh internal auditor atau aparat pengawas internal pemerintah dimaksud untuk membantu para

menteri/pimpinan lembaga meyakini bahwa laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAP. Sehingga audit internal mempunyai peran yang sangat penting bagi penyusunan laporan keuangan yang efektif.

Salah satu prinsip yang mendasari laporan keuangan keuangan daerah adalah transparansi. Transparansi berarti bahwa setiap anggota masyarakat mempunyai hak serta akses untuk memantau proses penganggaran karena ini menyangkut aspirasi dari masyarakat, terlebih mengenai pemenuhan kebutuhan untuk masyarakat. Prinsip dari transparansi ini mempunyai dua faktor, pertama yaitu komunikasi dari segi publik yang dilakukan pemerintah, dan yang kedua adalah hak akses atas informasi. Keduanya akan terasa sulit diaplikasikan jika pemerintah kinerjanya tidak baik. Komunikasi publik merupakan usaha pemerintah dalam membuka informasi serta aktivitasnya secara relevan. Transparansi harus diimbangi atas kebutuhan serta kerahasiaan dari lembaga maupun informasi yang berpengaruh terhadap hak serta privasi dari individu. (Juliastuti,2013).

1.2 Rumusan Masalah

Laporan keuangan pemerintah memiliki fungsi yang sangat vital. Salah satu fungsinya ialah laporan keuangan merupakan gambaran kondisi suatu pemerintah dan sebagai salah satu cara bagi pemerintah daerah untuk menunjukkan kinerjanya selama periode tertentu. Kualitas pelaporan keuangan merupakan serangkaian informasi yang dituangkan dalam pelaporan untuk dapat di pahami, guna memenuhi setiap kebutuhan pemakai pada saat pengambilan keputusan,

terbebas dari informasi yang dapat menyesatkan, bebas dari kesalahan segi material dan dapat juga diandalkan, sehingga pelaporan keuangan itu bisa dikaitkan dengan periode-periode yang sebelumnya (Sari, 2014). Kualitas informasi akuntansi keuangan daerah yang tidak baik dapat mengakibatkan kerugian pada pengambilan keputusan (Yusniyar,dkk, 2016). Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dalam penelitian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu sistem informasi akuntansi keuangan daerah (Andini,dkk,2015; Botutihe,2013; Diani,dkk,2014), audit internal (Diani,dkk,2014 dan Patra,dkk,2015) dan transparansi kebijakan publik (Juliastuti,2013 dan Putra,dkk,2016).

Hasil penelitian Diani (2014) menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Sedangkan menurut Wati,dkk pada tahun 2014 menunjukkan hasil sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Patra,dkk pada tahun 2015 yaitu variabel sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pada penelitian Diani (2014) menunjukkan bahwa peran internal audit berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Riyanti,dkk tahun 2014

menyatakan bahwa peran internal audit berpengaruh terhadap efektivitas penyusunan laporan keuangan dalam Satuan Kerja Makamah Syar'iyah di Aceh.

Menurut penelitian Juliastuti (2013) menyebutkan bahwa transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan menurut Putra,dkk (2016) menyatakan bahwa variabel transparansi berpengaruh negative dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Menurut penelitian-penelitian sebelumnya tersebut, belum terdapat gap riset pengaruh sistem informasi akuntansi keuangan, audit internal dan transparansi kebijakan publik terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kendal. Sehingga penelitian ini memodifikasi penelitian dengan menambahkan variabel audit internal. Penelitian ini menggunakan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, audit internal dan transparansi kebijakan public sebagai variabel yang diduga mempengaruhi Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen.

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh positif dari sistem informasi akuntansi pada keuangan daerah terhadap kualitas dari laporan keuangan pada pemerintah daerah Kendal?
2. Bagaimana audit internal mempengaruhi secara positif pada kualitas dari pelaporan keuangan pada pemerintah daerah di Kendal?

3. Bagaimana transparansi kebijakan publik berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kendal?
4. Bagaimana sistem informasi akuntansi keuangan daerah, audit internal dan transparansi kebijakan publik secara simultan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kendal?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisa bagaimana sistem pada informasi akuntansi keuangan daerah mempengaruhi secara signifikan pada kualitas pelaporan keuangan di pemerintah daerah Kendal.
- b. Untuk menganalisa bagaimana internal audit mempengaruhi kualitas dari laporan keuangan di pemerintah daerah Kendal.
- c. Untuk menganalisa transparansi dari kebijakan publik, bagaimana pengaruhnya terhadap kualitas pelaporan keuangan pada pemerintah daerah Kendal.
- d. Untuk menganalisa bagaimana sistem dari informasi akuntansi keuangan daerah, audit internal dan kebijakan publik yang transparan berpengaruh pada kualitas dari pelaporan keuangan daerah di pemerintah daerah Kendal.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian yang telah dilakukan sebelumnya berkenaan dengan pengujian pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah, audit internal dan transparansi kebijakan publik terhadap kualitas laporan

keuangan daerah pemerintah Kendal. Selain itu penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi peneliti dan akademisi yang lain dalam rangka memperluas ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan.

b. Manfaat Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam rangka melaporkan laporan keuangan sehingga laporan keuangan dapat berkualitas dengan baik. Selain itu penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan yang baik dan bagus untuk memacu pemerintahan agar mempublikasikan laporan keuangan pemerintah daerah dengan baik dan berkualitas dan masyarakat mendapatkan informasi yang lengkap dan terpercaya.